

## **KH. FAQIH USMAN: VISI POLITIK SEORANG ULAMA**

**Arifin Suryo Nugroho**

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: arifin.suryo16@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*KH. Faqih Usman was one of the best cadres of Muhammadiyah as well as Muhammadiyah's General Chairperson for the 1961-1971 term, although that position was only held for a few days because after his inauguration he later died on October 3, 1968. He was a person who inspired Muhammadiyah and the Indonesian Nation. The former MIAI management and member of the Central National Committee had the role of upholding the republic during the struggle for independence. Active in the Masyumi organization and as a former Minister of Religion during the Halim Perdanakusumah Cabinet, made him feel responsible when the PRRI eruption broke out. He along with M. Roem, struggled as hard as a mediator to reconcile the conflict between PRRI and the central government at that time. This research uses the historical research method, which consists of four stages namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The author uses a biographical approach to see figures in their historical framework.*

**Keywords:** *political biography, Muhammadiyah figures, Muhammadiyah history*

### **ABSTRAK**

KH. Faqih Usman adalah salah satu kader terbaik Muhammadiyah sekaligus Ketua Umum Muhammadiyah masa jabatan 1961-1971, meskipun jabatan itu hanya diemban beberapa hari saja karena setelah pelantikan ia kemudian wafat pada tanggal 3 Oktober 1968. Ia merupakan pribadi yang memberikan inspirasi kepada Muhammadiyah dan Bangsa Indonesia. Mantan pengurus MIAI dan anggota Komite Nasional Pusat itu memiliki peran menegakkan republik pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Aktif dalam organisasi Masyumi dan sebagai mantan Menteri Agama pada masa Kabinet Halim Perdanakusumah, membuatnya merasa bertanggung jawab ketika meletusnya peristiwa PRRI. Ia bersama M. Roem, berjuang sekuat tenaga sebagai mediator untuk mendamaikan konflik antara PRRI dengan pemerintah pusat saat itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penulis menggunakan pendekatan biografi untuk melihat tokoh dalam kerangka sejarahnya.

**Kata kunci:** biografi politik, tokoh Muhammadiyah, sejarah Muhammadiyah

## **PENDAHULUAN**

Sekalipun hanya mengecap pendidikan pondok, Faqih Usman tetap memiliki kewibawaan untuk memimpin suatu organisasi sosial dan politik yang bertaraf nasional. Ia adalah seorang ulama yang cerdas, rajin belajar, dan gemar membaca kitab-kitab agama serta ilmu pengetahuan sampai usia lanjut. Ia adalah seorang ulama yang memiliki ilmu yang mendalam, berpikiran maju, dan berpandangan jauh ke depan serta menjadi teladan bagi teman-teman dan generasi sesudahnya.

(KH. Yunus Anies)

Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya KH. Faqih Usman diangkat dan duduk dalam susunan kepengurusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan seterusnya selalu terpilih sebagai salah seorang staf ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Menjelang meninggalnya, pertengahan September ia dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta untuk periode 1968-1971. Namun jabatan itu sempat diemban hanya beberapa hari saja, karena ia segera dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa pada tanggal 3 Oktober 1968 (Mertju Suar, 1968).

Di luar Muhammadiyah, Faqih Usman juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan antara lain sebagai anggota Dewan Kota Surabaya pada tahun 1940-1942, bendahara Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1938, ketua dan sekretaris MIAI pada periode 1939-1942, dan anggota Komite Nasional Pusat dan ketua Komite Nasional Surabaya pada tahun 1945.

Kegiatannya sebagai salah satu pengurus besar di Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dimulai sejak partai tersebut didirikan pada tanggal 7 Nopember 1945 dalam suatu muktamar umat Islam di Yogyakarta. Pada tahun 1948, ia memangku jabatan wakil ketua Markas Tertinggi Hizbullah Sabilillah. Karier tertingginya di Masyumi adalah sebagai ketua II Pengurus Besar Masyumi yang dipangkunya sejak tahun 1952 sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1960.

Faqih Usman pernah dipercaya Pemerintah RI untuk memimpin Departemen Agama pada masa Kabinet Halim Perdanakusumah sejak tanggal 21 Januari 1950 sampai dengan tanggal 6 September 1950, dan pada tahun 1951 ia ditunjuk sebagai Kepala Jawatan Agama Pusat. Situasi politik di tanah air yang tidak stabil saat itu menyebabkan susunan kabinet pun jatuh bangun. Ia dipercaya kembali sebagai Menteri Agama pada masa kabinet Wilopo sejak tanggal 3 April 1952 sampai tanggal 1 Agustus 1953.

Selepas dari jabatan Menteri Agama RI, ia masih tetap duduk sebagai anggota aktif Konstituante, di samping jabatannya sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Departemen Agama sejak tahun 1954. Sebagai salah seorang tokoh Masyumi, dia juga terlibat aktif dalam resolusi konflik politik dalam negeri. Hal itu terlihat menjelang meletusnya gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Utara. Bersama dengan Mohammad Roem, ia berusaha menjadi mediator untuk mendamaikan konflik antara PRRI dengan pemerintah pusat saat itu. Ia berusaha menemui rekan-rekannya di Masyumi yang terlibat dalam kegiatan PRRI tersebut, seperti Muhammad Natsir, Boerhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara untuk mendialogkan persoalan yang semakin menajam menjadi perang saudara tersebut. Upaya ini tidak membawa hasil yang memuaskan, bahkan bisa dianggap gagal. Dalam keputusasaannya tersebut, akhirnya ia kembali ke Muhammadiyah sebagai basis aktivitas kemasyarakatannya.

Keterlibatan beberapa tokoh partai Masyumi dalam PRRI menyebabkan pemerintah di bawah Presiden Sukarno menyatakan Masyumi sebagai partai terlarang. Setelah lahirnya pemerintahan Orde Baru, tepatnya tanggal 9 Mei 1966, Faqih Usman bersama-sama dengan Hasan Basri dan H. Anwar Haryono mengirim nota politik kepada pemerintah, yang isinya meminta agar pemerintah merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang. Nota politik ini terkenal dengan nama "Nota KH. Faqih Usman" (Dasuki, 1996: 103). Nota politik ini didasarkan pada pertimbangan yuridis formal dan keyakinan bahwa rehabilitasi Masyumi tersebut bukan hanya memenuhi rasa keadilan berdasarkan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi

sekaligus akan meniupkan angin segar ke dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Ketika masih menjadi Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode kepengurusan KH. Ahmad Badawi yang pertama, yakni antara tahun 1962-1965, Faqih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan Kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 di Jakarta, dan akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah.

## **PEMBAHASAN**

### **Dari Gresik hingga Jakarta**

Faqih Usman dilahirkan di Gresik Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri sederhana dan taat beribadah. Ia merupakan anak keempat dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Masa kecilnya dilalui dengan belajar membaca al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Menginjak usia remaja, ia belajar di pondok pesantren di Gresik yang ditempuhnya antara tahun 1914-1918.

Antara tahun 1918-1924, Faqih Usman menimba ilmu pengetahuan di pondok pesantren di luar daerah Gresik. Dengan demikian, ia juga banyak menguasai buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional, karena penguasaannya dalam bahasa Arab. Dia juga terbiasa membaca surat kabar dan majalah berbahasa Arab, terutama dari Mesir yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan. Apalagi pada abad 19 dan awal abad 20 di dunia Islam yang pada umumnya sedang terjadi gerakan kebangkitan.

Faqih Usman tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi karena dilahirkan dalam lingkungan keluarga miskin. Meskipun begitu Faqih Usman dikenal memiliki etos *entrepreneurship* yang kuat. Oleh sebab itu, sejak masa mudanya ia telah terjun ke dunia usaha yang bergerak di bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Keuletannya dalam bidang usaha ini memberikan andil pada pengangkatan dirinya sebagai ketua Persekutuan Dagang Sekawan se-Daerah Gresik.

Berkat aktivitasnya ini ia dikenal luas oleh masyarakat Gresik, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Pada tahun 1922, ia memasuki organisasi Muhammadiyah dan pada tahun 1925 diangkat menjadi ketua Groep Muhammadiyah Gresik yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di Wilayah Jawa Timur. Selanjutnya karena kepiawaiannya sebagai ulama-cendekiawan, ia diangkat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur periode 1932-1936 yang berkedudukan di Surabaya, di samping memimpin Majalah *Bintang Islam*—media Muhammadiyah Jawa Timur. Pada tahun 1936 ia terpilih sebagai konsul Muhammadiyah Jawa Timur, menggantikan Mas Mansur yang dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada Mukhtamar ke-26.

Faqih Usman pun banyak terlibat aktif di berbagai gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah. Kegiatannya dalam Muhammadiyah memperluas jaringan pergaulannya, sehingga ia-pun terlibat aktif di berbagai organisasi masyarakat, seperti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) pada tahun 1937. Pada tahun 1940-1942, dia menjadi anggota Dewan Kota Surabaya. Pada tahun 1945 dia menjadi anggota Komite Nasional Pusat dan Ketua Komite Nasional Surabaya.

Di Muhammadiyah, pada periode 1948-1952, ketika Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua umum, Faqih Usman diangkat sebagai salah seorang ketua PP Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah diketuai oleh HM. Yunus Anies (1959-1961), Faqih Usman diangkat menjadi salah seorang anggota PP Muhammadiyah. Pada tahun 1959, Faqih Usman menerbitkan majalah *Panji Masyarakat* (Panjimas) bersama-sama dengan Hamka, Yusuf Abdullah Puar, dan Yusuf Ahmad. Majalah ini merupakan majalah yang memiliki ikatan yang erat dengan Muhammadiyah. Kemudian pada periode kepemimpinan Ahmad Badawi (1962-1965), Faqih Usman terpilih sebagai wakil ketua I PP Muhammadiyah, dan pada periode 1965-1968, periode kedua kepemimpinan Ahmad Badawi, Faqih Usman duduk sebagai penasihat PP Muhammadiyah.

Selama dua periode kepemimpinan Ahmad Badawi, Faqih Usman selalu diminta untuk mendampinginya dalam menunaikan tugas sebagai ketua umum Muhammadiyah. Karena besarnya kepercayaan KH. Ahmad Badawi kepadanya, maka ketika KH. Ahmad Badawi mulai sakit, pelaksanaan organisasi Muhammadiyah dipercayakan sepenuhnya kepada Faqih Usman. Di sini kelihatan isyarat dari KH. Ahmad Badawi agar Faqih Usman dipilih sebagai ketua umum Muhammadiyah selanjutnya. Akan tetapi, Faqih Usman menganggap dirinya tidak pantas menduduki jabatan ketua umum dan ia sering menampilkan tenaga-tenaga muda seperti Abdur Razzaq Fakhruddin dan M. Djindar Tamimy, sebagai calon ketua umum pada Muktamar Muhammadiyah ke-37. Namun, Muktamar yang diselenggarakan di Yogyakarta itu tetap memilihnya untuk memimpin Muhammadiyah periode 1968-1971.

### **Aktivistis Masyumi**

Partai Politik Masyumi dibentuk melalui kongres umat Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7 dan 8 Nopember 1945, yang dihadiri oleh hampir semua tokoh organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Pembentukan partai ini mendapat dukungan besar dari para ulama dan tokoh dari kelompok tradisional dan modernis. Dukungan terbesar diberikan oleh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Kongres tersebut menghasilkan dua keputusan penting, yaitu pembentukan sebuah partai politik dengan nama Masyumi, dan Masyumi satu-satunya partai politik bagi umat Islam Indonesia. Pembentukan partai ini adalah upaya menyalurkan aspirasi politik umat Islam yang besar jumlahnya sebagai penjelmaan kehendak dan cita-cita serta potensi mereka dalam lapangan politik dan kenegaraan. Menurut pandangan yang berkembang waktu itu, suatu massa yang besar dengan tidak dipimpin sebuah partai politik yang berasaskan Islam akan mudah jatuh ke golongan yang menentang penerapan syariat dalam kehidupan bernegara pada pasca-kemerdekaan.

Tujuan Masyumi dalam Anggaran Dasarnya dinyatakan: “Tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat

dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan Illahi.” Penjabaran tujuan ini dimuat dalam Tafsiran Anggaran Dasar: “Kita menuju pada *Baldah tayyibah wa rabbun gafur* (negara yang berkebijakan diliputi keampunan Illahi), dimana negara melakukan kekuasaannya atas dasar Musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih; dimana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan, lapang dada (tasamuh), keadilan sosial sebagaimana yang diajarkan Islam, terlaksana sepenuhnya; dimana kaum muslimin mendapat kesempatan mengatur peri kehidupan pribadi dan masyarakatnya sesuai dengan ajaran dan hukum-hukum Islam sebagai yang tercantum dalam Al Quran dan sunah; dimana golongan keagamaan yang lainnya memilih kemerdekaan untuk menganut dan mengamalkan agamanya serta mengembangkan kebudayaannya, dimana bagi seluruh penduduknya dari segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman; terjamin baginya hak-hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi, dan politik, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang negara dan susila” (Dasuki, 1996: 195).

Faqih Usman ikut andil dalam pendirian Partai Masyumi ini sejak didirikannya dalam Mukhtamar Umat Islam di Yogyakarta itu. Dia duduk sebagai salah seorang Pengurus Besar Masyumi, dan pada tahun 1952 duduk sebagai Ketua II sampai dengan tahun 1960, yaitu pada saat Masyumi dibubarkan.

Dalam pemilu pertama, 29 September 1955, Masyumi berhasil menduduki urutan kedua dalam pengumpulan suara dengan 20,9 persen suara. Sedangkan peringkat pertama diduduki oleh Partai Nasional Indonesia dengan 22,3 persen suara, NU mendapat 18,4 persen suara, Partai Komunis Indonesia 16,4 persen suara, sisanya diraih PSII 2,9 persen suara, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 1,3 persen suara. Dalam pemilu 1955 ini, pihak Islam memperoleh 116 dari 260 kursi DPR (44,62%) dan 228 dari 520 kursi Konstituante (43,85%). Untuk Masyumi sendiri, di DPR memperoleh 57 kursi (21,92%), di konstituante memperoleh 112 kursi (21,54%). Jadi persentase

perolehan kursi Masyumi untuk kedua lembaga adalah 49% dari perolehan pihak Islam (Syaifullah, 1997:172).

Karena Muhammadiyah adalah anggota istimewa Masyumi, maka perolehan kursinya di DPR dan Konstituante harus dilihat dalam Masyumi. Dari 57 kursi Masyumi di dewan, 13 kursi diisi oleh orang-orang Muhammadiyah (22,87%). KH Fakhri Usman termasuk dari 13 orang yang mewakili Muhammadiyah dan Masyumi di DPR. Dua belas nama yang lain adalah Dr. H. Ali Akbar, H. Andi Sewang Daeng Muntu, Anwar Haryono, Moh. Anwar Zain, H. Hasan Basri, Mr. Kasman Singodimedjo, KH. Masjhuri Azhari, Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Sardjan, Saalah Jusuf Sutan Mangkuto, Dr. H. Sukiman Wirjosandjojo, dan M. Junan Nasution.

Sementara itu untuk konstituante dari 112 kursi yang diperoleh Konstituante dari 112 kursi yang diperoleh Masyumi di Konstituante, Muhammadiyah mendapatkan 21 (18,75%). KH. Faqih Usman terpilih mewakili Muhammadiyah dan Masyumi dalam konstituante bersama 20 tokoh lain yaitu Mohammad Sardjan, Mr. H. Kasmat, Dr. Kusnadi, Dr. H. Sukiman Wirjosandjojo, Hamka, Prawoto Mangkusasmito, Prof. A. Kahar Muzakir, Mr. Kasman Singodimedjo, K. Taufiqurrahman, Ahmad Dasuki, E. Sutoleksono, Amelz, Mr. Djamaluddin Datuk Singomangkuto, KH. Ahmad Azhari, Zainal Abidin Su'aeb, AR. Sutan Mansur, Abdul Malik Ahmad, Oesman Raliby, KRH. Hadjid, dan KH. Asnawi Hadisiswojo.

Dengan demikian di DPR Muhammadiyah mendapat porsi 5% (13 dari 260 kursi) dan di Konstituante 4,04% (21 dari 520 kursi). Dari 21 kursi wakil Muhammadiyah di Konstituante, 5 Orang diantaranya juga menjadi anggota Dewan, yaitu KH Faqih Usman, Dr. H. Sukiman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mohammad Sardjan.

Sebelum Faqih Usman mewakili Muhammadiyah dan Masyumi di Dewan dan Konstituante hasil pemilu 1955, ia sebelumnya dua kali telah menjabat Menteri Agama pada masa kabinet Halim dan Wilopo. Ia menduduki jabatan itu sebagai wakil dari Muhammadiyah dan Masyumi. Dalam kabinet Halim (21 Januari 1950-6 September 1950), Faqih Usman mewakili pihak Islam dan Muhammadiyah sebagai menteri agama.

Dalam kabinet itu pihak Islam yang diwakili Masyumi memperoleh 3 dari 15 jabatan (20%). Selain Faqih Usman, ada wakil perdana menteri (Abdul Halim), menteri penerangan (Wiwoho Purbohadidjojo).

Kemudian ketika kabinet Wilopo memimpin pada 3 April 1952-30 Juli 1953, Faqih Usman kembali dipercaya menjabat menteri agama. Dalam kabinet ini, pihak Islam memperoleh 5 dari 18 jabatan. Satu jabatan diperoleh PSII yaitu menteri sosial (Anwar Tjokroaminoto), 4 jabatan diperoleh Masyumi semuanya diisi oleh unsur Muhammadiyah, yaitu wakil perdana menteri (Prawoto Mangkusasmito), menteri dalam negeri (Mr. Mohammad Roem), menteri pertanian (Mohammad Sardjan), dan menteri agama yang dijabat Faqih Usman.

Untuk kali ini pengangkatan Faqih Usman sebagai menteri agama RI mempunyai dampak yang cukup memprihatinkan bagi Masyumi, yaitu berpisahnya Nahdatul Ulama dari Masyumi. Beberapa hari sebelum pembentukan kabinet Wilopo/Prawoto, dalam suatu pertemuan Masyumi, pihak NU melalui juru bicaranya, KH. Abdul Wahab Hasbullah menuntut agar pos jabatan menteri agama diberikan kepada mereka. Akan tetapi ketika diadakan pemungutan suara dalam sidang tersebut, Faqih Usman mendapat suara terbanyak untuk menduduki jabatan tersebut.

Aktivitas Faqih Usman di Masyumi terus berlanjut sampai partai ini di-ultimatum Sukarno untuk membubarkan diri pada tahun 1960. Sebelumnya adanya ultimatum, Faqih Usman adalah aktivis yang memperjuangkan Muhammadiyah dalam Masyumi. Misalnya pada tahun 1957 dimana ada wacana PP Muhammadiyah tentang penghapusan keanggotaan istimewanya di Masyumi. Pada sidang Tanwir 1957, persoalan itu diagendakan. Dipimpin oleh Faqih Usman pembicaraan berkisar pada tiga alternatif penyelesaian, yaitu (1) menghendaki supaya Tanwir mengambil keputusan lebih maju, yaitu Muhammadiyah perlu menarik diri dari keanggotaan istimewa Masyumi; (2) menghendaki supaya keputusan yang lalu (Masyumi meniadakan peraturan keanggotaan istimewa) diperjuangkan lagi secara lebih teratur dan gigih; (3) menghendaki supaya masalah ini ditunda sampai selesainya pemilu daerah. Keputusan saat itu berpihak pada alternatif ketiga, masalah itu ditunda sampai sidang Tanwir 1958.

Pada Tanwir 1958 ini anggota Muhammadiyah menyetujui tentang penghapusan anggota istimewa Muhammadiyah dalam Masyumi (Syaifullah, 1997:209).

Muhammadiyah mengakhiri statusnya sebagai anggota istimewa di Masyumi secara formal pada 8 September 1959 dimana saat itu 13 dari 19 orang yang duduk di PP Masyumi adalah orang Muhammadiyah. Ketua Masyumi saat itu adalah kader Muhammadiyah Prawoto Mangkusasmito, dan tiga wakil ketua dari Muhammadiyah yaitu Faqih Usman, Dr. Sukiman Wirjosandjojo, dan Mr. Mohammad Roem. Hubungan Muhammadiyah dengan Masyumi semakin merenggang setelah beberapa tokoh Masyumi terlibat dalam PRRI, 15 Februari 1958. Hal ini menjadi tidak menguntungkan bagi masa depan Masyumi dan ia harus menanggung getahnya. Setahun kemudian pemerintah Sukarno mengultimatum Masyumi agar membubarkan diri karena dianggap partai terlarang, Masyumi bubar pada tahun 1960.

Setelah mengalami pergumulan dalam bidang politik, mengenai Muhammadiyah, Masyumi, dan Pembentukan Masyarakat Islam, Faqih Usman memiliki pemikiran demikian:

Dalam kalangan umat Islam Indonesia ternyata sekarang ada perjuangan yang nyata menuju ideologi Islam, dan terbentuknya negara yang sedikit nyata sesuai dengan ideologi Islam sebagai kelanjutan dari republik kita yang sekarang. Sedang hasil pemilihan umum yang sudah, baik untuk konstituante maupun DPR, membuktikan bahwa tujuan itu tidak dapat diwujudkan semudah dugaan orang. Hal ini terutama karena masyarakat Indonesia sebenarnya belum cukup dipersiapkan untuk mencapai ideologi Islam. Bahkan sebenarnya masyarakat Indonesia masih tetap, masih belum berubah dari ujudnya zaman penjajahan dahulu, masih jauh dari ideologi Islam.

Partai yang berideologi Islam, Partai Masyumi, yang Muhammadiyah turut mendirikan adalah yang diikuti oleh umumnya kaum Muhammadiyah yang berpolitik. Tujuan Masyumi menurut Anggaran Dasarnya, terlaksananya tuntutan Islam dalam diri orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia. Maka

antara Muhammadiyah dan Masyumi pada hakekatnya adalah terdapat satu tujuan. Perbedaannya dalam lapangan kerjanya. Muhammadiyah dalam lapangan masyarakat, sedangkan Masyumi dalam lapangan politik (Puar, 1989: 274).

### **Membidani Lahirnya Partai Muslimin Indonesia**

Setelah lahirnya pemerintahan Orde Baru, Faqih Usman bersama-sama dengan Hasan Basri dan H. Anwar Haryono mengirim nota politik kepada pemerintah, yang isinya meminta agar pemerintah merehabilitasi Masyumi sebagai partai terlarang. Nota politik yang kemudian dikenal dengan “Nota KH. Faqih Usman” ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rehabilitasi Masyumi tersebut bukan hanya memenuhi rasa keadilan berdasarkan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi sekaligus akan meniupkan angin segar ke dalam kehidupan politik bangsa Indonesia.

Pasca peristiwa G30S 1965, pemerintah Orde Baru di samping bertekad mengadakan restrukturisasi kehidupan politik, menyadari bahwa aspirasi umat Islam Indonesia belum semuanya tertampung dalam partai-partai yang sudah ada, khususnya partai-partai Islam. Untuk itu pada awal pemerintahannya Orde Baru membuka peluang untuk dibentuknya partai baru.

Masyumi tampaknya tidak akan dihidupkan lagi sebagai partai Islam oleh para bekas pendukungnya. Hal itu terbukti pada tanggal 7 Mei 1967 ditandatangani deklarasi pembentukan Partai Muslimin Indonesia yang didukung oleh 18 organisasi massa Islam yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM). Pada tanggal 6 Februari 1968, terbentuklah komisi 7 (Komisi Pembentukan Parmusi) terdiri dari KH. Faqih Usman sebagai ketua, Agus Sudono sebagai sekretaris dengan anggota Hasa Basri, Anwar Haryono, EZ Muttaqien, Marzuki Yatim, dan Samsurijal. Dalam Keputusan Presiden Nomor 70 tanggal 20 Februari 1968 tentang pembentukan Partai Muslimin Indonesia, yang menjadi presiden partai adalah Djarnawi Hadikusumo dengan sekretaris Jenderal Drs. H. Lukman Harun (Dasuki, 1996: 84).

Mengenai kelahiran Partai Muslimin Indonesia ini, dari pihak pemerintah Orde Baru yang diwakili Pangdam V Jaya Mayjend Amir Machmud mengatakan bahwa semuanya, termasuk Partai Muslimin Indonesia, harus konsekuen untuk ikut serta mensukseskan program pembangunan yang sudah digariskan pemerintah dalam Sidang Umum ke-V MPRS. Amir Machmud saat itu mengharapkan agar Partai Muslimin Indonesia mampu memberikan andilnya dalam perjuangan pembangunan bangsa Indonesia. Lebih jauh ia juga mengatakan bahwa kelahiran Partai Muslimin Indonesia merupakan fitrah potensial yang menambah kekuatan bagi orde baru dalam mencapai tujuannya (*Mertju Suar*, 22 Mei 1968).

Sementara itu PP Muhammadiyah setelah secara khusus membicarakan telah diakuinya Partai Muslimin Indonesia, di Jalan Menteng Raya 62 pada tanggal 27 dan 28 Februari 1968 mengeluarkan pernyataan:

#### **Syukur dan Terima Kasih**

PP Muhammadiyah mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwa Partai Muslimin Indonesia yang diprakarsai bersama pembentukannya bersama Muhammadiyah dengan ormas-ormas dan potensi Islam lainnya telah terwujud, dengan telah diakui dan disahkan berdirinya pada tanggal 20 Februari 1968 oleh Pd. Presiden Republik Indonesia, Jenderal Suharto.

Kepada Pd. Presiden pada khususnya dan pemerintah RI pada umumnya, PP Muhammadiyah menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kebijakan dan pengakuan berdirinya Partai Muslimin Indonesia. Disadari dan diakui bahwa Partai Muslimin Indonesia lahir masih mengandung kekurangan, tetapi Insyaallah dengan usaha bersama dapat diisi dan disempurnakan di masa-masa yang akan datang hingga menjadi partai yang dapat memenuhi keinginan obyektif umat Islam Indonesia pada umumnya.

#### **Sambutan Baik dan Dukungan**

PP Muhammadiyah mengharap dan yakin bahwa Partai Muslimin Indonesia akan mendapat sambutan baik rakyat Indonesia umumnya, dan mendapat dukungan dari

umat Islam Indonesia khususnya. Partai Muslimin Indonesia hendaknya dapat mengambil bagian untuk membina persatuan nasional dan menjadi wadah aspirasi politik umat Islam Indonesia.

### **Politik dengan Jiwa dan Ruh Islam**

Partai Muslimin Indonesia hendaknya dapat memperlihatkan perjuangan politik yang diandasi ruh Islam, memperkuat dan mengisi dasar negara Pancasila, membina Orde Baru yang bersendikan kebenaran dan keadilan dalam menjamin hak-hak demokrasi, mencapai rakyat adil makmur yang diridhai Allah Swt.

Kepada warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, dianjurkan supaya bersama-sama dengan umat Islam Indonesia umumnya giat membentuk dan membina Partai Muslimin Indonesia di tempatnya masing-masing (*Mertju Suar*, 1 Maret 1968).

Dalam perkembangannya, dua tahun setelah Partai Muslimin Indonesia berdiri, 13 Maret 1970 atas perintah Presiden Suharto yang dibicarakan kepada para pemimpin partai Islam saat itu, terbentuklah kelompok spiritual yang terdiri dari Partai Muslimin Indonesia, Nahdatul Ulama, PSII, dan Perti dengan nama kelompok Persatuan Pembangunan. Pada tahun 5 Januari 1973 menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

### **PENUTUP**

Dalam perundingan yang diadakan oleh sembilan orang anggota PP Muhammadiyah yang terpilih dengan suara terbanyak pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 ditetapkan ketua dan wakil-wakil ketua PP Muhammadiyah periode 1968-1971. KH. Faqih Usman dipilih oleh sembilan orang anggota PP Muhammadiyah untuk diamanahi memimpin PP Muhammadiyah periode 1968-1971. Sedangkan wakil-wakil ketua PP Muhammadiyah yaitu AR. Fakhruddin, Prof. Dr. Rasjidi, H. Abdul Malik Ahmad, HM. Junus Anies. Penetapan ketua itu adalah untuk memenuhi ketentuan AD Muhammadiyah untuk kemudian dilaporkan kepada Muktamar dan ditetapkan (*Mertju Suar*, 24 September 1968).

Terpilihnya KH. Faqih Usman sebagai Ketua PP Muhammadiyah saat itu oleh sembilan anggota Pengurus Pusat tidak mendasarkan diri pada perolehan suara terbanyak. Dalam Muktamar ke-37 jika dilihat dari perolehan suara terbanyak, AR. Fakhruddin yang mendapatkan suara terbanyak itu. Akan tetapi sidang sembilan orang anggota PP Muhammadiyah memiliki alasan lain untuk memilih KH. Faqih Usman untuk memimpin Muhammadiyah. Nama-nama anggota PP Muhammadiyah periode 1968-1971 dengan suara yang diperolehnya secara berurutan adalah AR. Fakhruddin (933 suara), Prof. Dr. HM Rasjidi (787 suara), KH. Faqih Usman (784 suara), Prof. Dr. Hamka (777 suara), HM. Djindar Tamimy (770 suara), Dr. H. Kusnadi, HM. Junus Anies (553 suara), HA. Malik Ahmad (552 suara), dan Prof. KH. A Kahar Muzakir (535 suara) (*Mertju Suar*, 24 September 1968).

PP Muhammadiyah periode 1968-1971 langsung berjalan dengan program-program gebrakan, misal dalam hal menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah antar lembaga organisasi massa dan organisasi politik Islam. PP Muhammadiyah menyelenggarakan rapat di PP Muhammadiyah Yogyakarta dan dihadiri ornop maupun ormas keagamaan misal HMI maupun NU. Dalam pertemuan itu mereka tidak mendebatkan masalah-masalah yang prinsip. Pertemuan yang digagas Muhammadiyah itu bertujuan untuk mempersatukan pendapat, langkah, dan perjuangan diantara parpol dan ormas Islam. Mereka juga berusaha untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan, penyebaran agama, sosial, dan lain-lain (*Mertju Suar*, 26 September 1968).

Sementara itu mengenai perkembangan organisasi Muhammadiyah, Presiden Suharto saat itu menyatakan menaruh simpati terhadap langkah dan gerak Muhammadiyah. Dalam penutupan Muktamar ke-37, Presiden menyatakan dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Transkop Sarbini, “bahwa pendiri dan pemimpin-pemimpin Muhammadiyah lahir di tengah-tengah rakyat. Dan Muhammadiyah bisa teguh karena rakyat yang merupakan sumber pendukungnya terbesar. Kelahiran dan pertumbuhan mempunyai landasan sejarah dan panggilan agama serta kemanusiaan yang kuat. Telah banyak amal usaha Muhammadiyah yang dinikmati masyarakat.

Namun Muhammadiyah jangan lekas puas diri yang hanya akan menimbulkan kemunduran. Dan kemunduran bertentangan dengan Islam. Sebab Islam mengajarkan kepada umatnya untuk terus maju (*Mertju Suar*, 27 September 1968).”

Tetapi takdir berkata lain, KH. Faqih Usman tidak lama dalam memimpin Muhammadiyah. Sekitar sebulan setelah dipilih menjadi ketua PP Muhammadiyah, KH. Faqih Usman meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1968, dalam usia 65 tahun di kediamannya di Jakarta karena sakit. Padahal sehari sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober 1965, ia mengundang anggota PP Muhammadiyah untuk bersidang di Jakarta. Dalam sidang tersebut Faqih Usman mengajukan program kerja PP Muhammadiyah dan garis besar kebijakan PP Muhammadiyah periode 1968-1971. Pada hari itu KH. Faqih Usman mungkin sudah mendapat firasat, sebelum ia menutup rapat, ia menunjuk Prof. Dr. HM Rasjidi dan H. AR. Fakhruddin untuk menjalankan kepemimpinan Muhammadiyah karena KH. Faqih Usman berencana ke luar negeri untuk berobat. Tetapi sehari kemudian, setelah ia memimpin rapat bersama anggota PP Muhammadiyah, Allah memanggil-Nya. AR. Fakhruddin kemudian menggantikan kepemimpinannya setelah diajukan oleh Buya AR. Sutan Mansur dan disetujui oleh 8 anggota PP Muhammadiyah yang lain (*Mertju Suar*, 8 Oktober 1968).

### DAFTAR PUSTAKA

Dasuki, A. Hafizh dkk. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Puar, Yusuf Abdullah. 1989. *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*. Jakarta : Pustaka Antara.

Syaifullah. 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

#### **Surat Kabar:**

“ NU dan HMI Sambut Baik Ajakan PP Muhammadiyah” dalam *Mertju Suar*, 26 September 196

“9 Anggota PP Terpilih”, dalam *Mertju Suar*, 24 September 1968.

- “HAR Fakhruddin Penggani Ketua PP Muhammadiyah, Dipilih Atas Saran Buya AR Sutan Mansur”, dalam *Mertju Suar*, 8 Oktober 1968.
- “KH Faqih Usman Meninggal”, dalam *Mertju Suar*, 4 Oktober 1968, hlm. 1.
- “KH. Faqih Usman Ketua PP Muhammadiyah 1968-1971”, dalam *Mertju Suar*, 24 September 1968.
- “Muhammadiyah Jadi Penggerak Pelopor Masyarakat Supaya Aktif Turut Serta dalam Pembangunan”, dalam *Mertju Suar*, 27 September 1968.
- “Pangdam V Jaya Mayjend Amir Machmud: Partai Muslimin harus Berikan Andil Besar”, dalam *Mertju Suar*, 22 Mei 1968.
- “Pernyataan PP Muhammadiyah: Hendaknya Perlihatkan Perjuangan Politik yang Berlandaskan Rus Islam”, dalam *Mertju Suar*, 1 Maret 1968.